

LAPORAN

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

PERIODE APRIL S.D JUNI

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2021 ini.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dalam tahun 2021 ini dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus memenuhi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor : 1321/DjMT.3/B/11/2018 tanggal 6 Nopember 2018 dan Nomor: 773/DjMT.3/B/07/2019 tanggal 2 Juli 2019 perihal Laporan Kepuasan Pelayanan Publik.

Laporan hasil survei ini berisikan elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan ini memberikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Kepuasan Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2021 untuk Triwulan II ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 21 Juli 2021
Ketua Tim Survey

Rory Yonaldi, S.H., M.H.
NIP. 198511122008051002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUJUAN dan SASARAN	3
C. RENCANA KERJA PELAKSANAAN.....	3
D. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	4
E. TARGET CAPAIAN SURVEI	4
BAB II METODE SURVEY	5
A. JENIS DATA	5
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	5
C. VARIABEL PENGUKURAN IKM	6
D. TEKNIK ANALISA DATA	8
BAB III PROFIL RESPONDEN	10
BAB IV HASIL SURVEY DAN ANALISA DATA	11
1. Fasilitas Pengadilan.....	11
2. Pendaftaran.....	11
3. Persidangan	12
4. Profesional Hakim.....	13
5. Pemberian Salinan Putusan	14
6. Pelayanan Informasi.....	14
7. Pelayanan Pengaduan.....	15
8. Pelayanan Persuratan	16
9. Pengembalian Sisa Panjar Biaya.....	16
10. Permohonan Eksekusi	17
11. Aparatur Pengadilan.....	18
BAB V NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	20
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan survei pertama kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan Akreditasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan survei yang dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Pada survei yang ini jumlah responden sebanyak 35 orang, dengan anggapan bahwa besaran responden tersebut telah cukup representative mewakili masyarakat.

Survei Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2021 dilakukan, dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan, diperlukan adanya perubahan-perubahan, terutama restrukturisasi tim strategi pelayanan. Strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai yang akhirnya akan menghasilkan *outcome* yang memuaskan yang dapat dilihat dari hasil survei. Kalau dilihat dari hasil survei di bulan April s.d Juni 2021, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **3,68 kategori A** dengan kinerja **Sangat Baik**. Diharapkan hasil survei tersebut mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pada Pengadilan Tata usaha Negara Pangkalpinang karena sejak *awal* April hingga akhir Juni 2021 seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, mulai dari level Pimpinan, staf

dan honor yang selalu berusaha terus menerus melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

B. TUJUAN dan SASARAN

Survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

C. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Survey ini dilaksanakan pada April sampai dengan Juni 2021. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

No .	K e g i a t a n	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	01 s.d 30 Juni 2021
2	Tim survey melakukan survey sesuai jadwal	01 April s.d 30 Juni 2021
3	Pengumpulan Data / Survey IKM	01 April s.d 30 Juni 2021
4	Pengolahan Data	11 s.d 14 Juli 2021
5	Penyusunan dan Pelaporan	15 s.d 21 Juli 2021

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Tim survei menentukan metode survei, besaran dan teknik penarikan sampel
2. Tim survei membuat instrument berupa kuisisioner.
3. Menentukan responden
4. Tim survei memperbanyak kuisisioner, menentukan jadwal pelaksanaan survei.
5. Tim survei melakukan survey sesuai jadwal.
6. Kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim survei.
7. Tim survei menganalisa kuesioner yang sudah terisi.
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk tabel, diagram dan deskriptif.
9. Hasil analisa diserahkan kepada Manajer Representatif (MR).

E. TARGET CAPAIAN SURVEI

Dalam survei periode April sampai dengan Juni 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, seluruh unsur pengadilan beserta staf dan karyawan menargetkan hasil yang maksimal yaitu dengan Kategori A atau kriteria **Kinerja Sangat Baik** atau bila dikonversikan dengan angka yaitu antara 81,26 s.d 100.

BAB II

METODE SURVEY

A. JENIS DATA

Data utama dalam survei ini adalah data primer yang diperoleh dari responden yang diperoleh dengan cara mengisi kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka, dengan pilihan jawaban dari angka 1 hingga 4. Populasi dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, terdiri dari:

1. Penggugat
2. Tergugat
3. Saksi
4. Penasihat Hukum
5. Pengunjung / Wartawan / Pengguna Pengadilan lainnya

Populasi di Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah para pengunjung atau pengguna jasa di pengadilan, yang setiap hari rata-rata adalah 1 s.d. 2 orang pengunjung, sehingga dalam seminggu hari kerja sekitar 5 orang. Populasi pengunjung di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang umumnya homogen, sehingga populasi satu Minggu dan populasi selama satu bulan adalah sejenis. Tim survei tidak mungkin mengambil semua populasi untuk satu bulan, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka Tim Survei menggunakan sampel sebanyak 25 atau 25 % dari angka rata-rata populasi selama satu bulan. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili).

Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 4 orang responden yang diambil dengan teknik *simple random sampling* (sampel acak sederhana). Jumlah tersebut diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah Pengunjung rata-rata perhari adalah 1 - 2 orang.
2. Jumlah Pengunjung rata-rata per minggu adalah 1 orang x 5 hari kerja = 5 orang,
3. Jumlah Pengunjung rata-rata per bulan adalah 4 minggu x 7 orang = 28 orang,
4. Jumlah Responden adalah 15 % x 28 orang = 4 - 5 orang.

C. VARIABEL PENGUKURAN IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang lingkup antara lain:

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas Pengadilan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam penyediaan fasilitas pengadilan.

2. Pendaftaran

Pendaftaran adalah tata cara pelayanan pendaftaran yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.

3. Persidangan

Persidangan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses persidangan.

4. Profesional Hakim

Profesional Hakim adalah

5. Pemberian Salinan Putusan

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada.

6. Pelayanan Meja Informasi

Produk Pelayanan Meja Informasi adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

7. Pelayanan Pengaduan

Pelayanan Pengaduan adalah layanan yang harus disediakan terhadap setiap pengaduan yang ada.

8. Pelayanan Persuratan

Pelayanan Persuratan adalah pelayanan yang harus disediakan terhadap surat-surat yang masuk.

9. Pengembalian Sisa Biaya Panjar

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara adalah merupakan pengembalian sisa biaya perkara setelah perkara tersebut diminutasi.

10. Permohonan Eksekusi

Permohonan Eksekusi adalah layanan yang disediakan terhadap eksekusi perkara yang sudah putus.

11. Sikap Aparatur Pengadilan

Aparatur Pengadilan adalah segenap aparat di Pengadilan yang memberikan layanan di Pengadilan.

Berdasarkan ruang lingkup survei di atas, tim pelaksana survei di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Bagaimana tanggapan saudara mengenai Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik?

2. Pendaftaran

Bagaimana menurut saudara mengenai Pendaftaran Perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

3. Persidangan

Bagaimana menurut saudara mengenai Layanan Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

4. Profesional Hakim

Bagaimana menurut saudara mengenai Profesional Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

5. Pemberian Salinan Putusan

Bagaimana menurut saudara mengenai Pemberian Salinan Putusan untuk jenis pelayanan yang saudara terima di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

6. Pelayanan Meja Informasi

Bagaimana menurut saudara pelayanan Informasi yang saudara terima sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

7. Pelayanan Pengaduan

Bagaimana menurut saudara mengenai kemampuan petugas pelaksana pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

8. Pelayanan Persuratan

Bagaimana menurut saudara tentang Pelayanan Persuratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

9. Pengembalian Sisa Biaya Panjar

Bagaimana menurut saudara mengenai Pengembalian Sisa Panjar Biaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan pelayanan yang saudara terima?

10. Permohonan Eksekusi

Bagaimana menurut saudara mengenai penanganan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

11. Sikap Aparatur Pengadilan

Apakah Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sudah memberikan layanan yang maksimal bagi pelanggan/pencari keadilan?

D. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini disusun dalam bentuk diagram frekuensi dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif. Indikator penilaian skor yang digunakan adalah sebagai berikut:

KATEGORISASI PELAYANAN

NO	SKOR	MUTU	KINERJA
	1,00 - 1,75	D	Tidak Baik
	1,76 - 2,50	C	Kurang Baik
	2,51 - 3,25	B	Baik
	3,26 - 4,00	A	Sangat Baik

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan cara Nilai tertinggi – Nilai Terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu: $\frac{4 - 1}{5} = 0,75$

NILAI INTERVAL KONVERSI

NO	SKOR	MUTU	KINERJA
	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
	62,51 - 81,25	B	Baik
	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Nilai interval di atas di peroleh dari :

$$1. \text{ Untuk skor minimum dalam prosentase } = \frac{\text{skor minimum}}{\text{skor maksimum}} \times 100 \% = \frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$$

$$2. \text{ Untuk skor maksimum dalam prosentase } = \frac{\text{skor maksimum}}{\text{skor minimum}} \times 100 \% = \frac{4}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

$$3. \text{ Untuk Interval dalam prosentase } = \text{Skor maksimum} - \text{skor minimum} = 100 \% - 25 \% = 75 \%$$

$$4. \text{ Sehingga untuk jenjang interval dalam prosentase } = \frac{\text{interval}}{\text{jenjang}} = \frac{75 \%}{4} = 18,75 \%$$

NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

Nilai Interval	Nilai Nilai Interval Konversi Pelayanan Pelayanan		Mutu Kinerja dan Persepsi	
	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

1. Jawaban responden dikonversikan dengan angka 1, 2, 3 dan 4.
2. Nilai Rata-rata per unsur yang ditanyakan diperoleh dengan perhitungan jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah responden.
3. Nilai tertimbang diperoleh dengan perhitungan jumlah seluruh nilai rata-rata per unsur.
4. Sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari nilai konversi pelayanan.

BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Usia Responden

Mayoritas responden ini berusia sekitar 17 tahun sampai dengan 24 tahun.

B. Jenis Kelamin Responden

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Perempuan.

C. Pendidikan Terakhir Responden

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah SLTA.

D. Pekerjaan Utama Responden

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Pelajar / Mahasiswa

Dilihat dari profil responden yang dipilih untuk mengisi kuesioner umumnya berusia antara 17 tahun sampai dengan 24 tahun. Pada dasarnya orang-orang yang berusia antara 17 tahun sampai dengan 24 tahun cukup mapan tingkat emosi maupun pemikirannya, sehingga jawaban yang diberikan saat mengisi kuesioner dapat dikatakan akan obyektif. Apalagi bila dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendidikan responden umumnya berpendidikan SLTA. Walaupun sebaran tingkat pendidikan responden cukup merata, mulai dari yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Pascasarjana. Tingkat pendidikan responden ini juga akan ikut berpengaruh dalam penilaian yang diberikan, walaupun tidak terlalu signifikan. Dilihat dari pekerjaan responden, sebagian besar bekerja Wiraswasta yaitu sebagai Pengacara dan Pelajar/Mahasiswa, artinya responden dalam kategori ini adalah orang-orang yang cukup mengerti dan memahami objek yang akan ditanyakan dan memberikan penilaian yang se-obyektif mungkin.

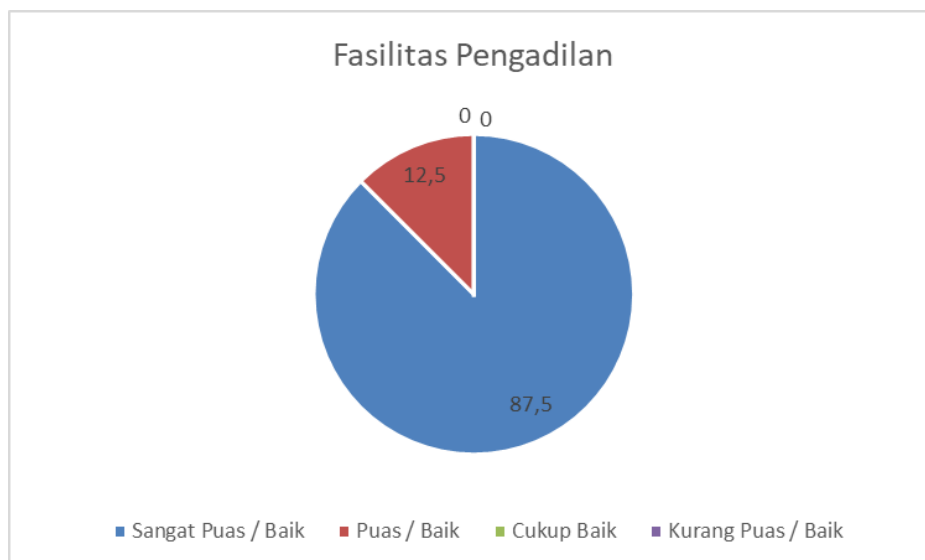
BAB IV

HASIL SURVEY DAN ANALISA DATA

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersaji dalam data berikut ini:

1. Fasilitas Pengadilan

Hasil analisis pada ruang lingkup **Fasilitas Pengadilan** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:

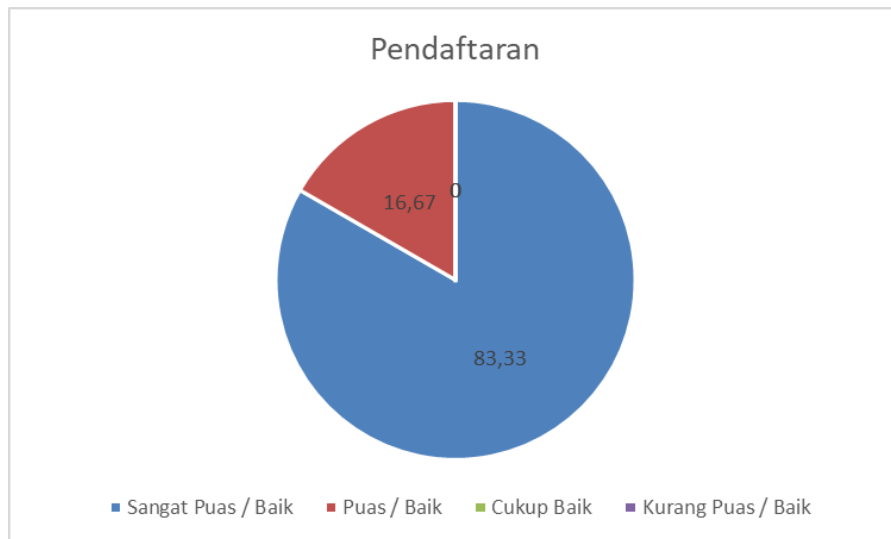


Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Dari diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Fasilitas Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Sangat Puas / Baik (4 responden / 87,50 %), yang mengatakan Puas / Baik (2 responden / 12,50%), yang mengatakan Cukup Baik (0 responden / 0 %) sedangkan yang mengatakan Kurang Baik (0 responden / 0 %). Hal ini menurut tim survei tidak terlepas dari Fasilitas Pengadilan yang disediakan.

2. Pendaftaran

Hasil analisis pada ruang **Pendaftaran** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:



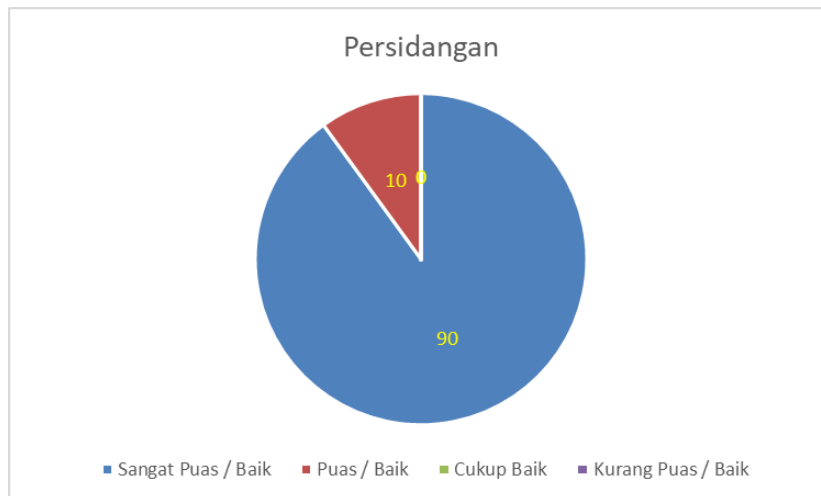
Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Prosedur pelayanan pendaftaran secara umum yang diberikan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, oleh responden dinyatakan **Sangat Baik (3 responden / 83.33%)**, menyatakan **baik (1 responden / 16,67%)**, menyatakan **Cukup Baik (0 responden / 0 %)** dan **kurang baik (0 responden / 0 %)**. Secara umum pelayanan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sangatlah banyak dan beragam serta melibatkan banyak unit pelayanan. Bagian Umum, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Perkara, banyak menghasilkan produk pelayanan kepada masyarakat. Masing-masing bagian tersebut memiliki staf yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dan sejumlah tata laksana kerja serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus ditaati dan menjadi acuan bersama. Masyarakat kadang kala tidak memahami atau tidak mau mengerti SOP yang telah ada, dan menganggapnya sebagai penghambat atau dimaksudkan untuk mempersulit.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing unit kerja adalah satu keniscayaan dan keharusan. Bila SOP ini tidak ada maka kekacauan dan ketidakjelasan kerja yang akan terjadi dan pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat sendiri.

3. Persidangan

Hasil analisis pada ruang lingkup **Persidangan** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:

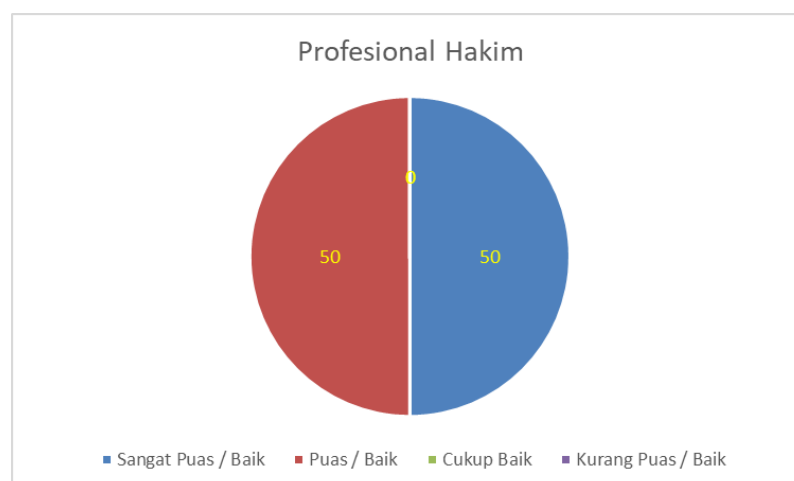


Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang menyatakan Layanan Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang **Sangat Baik (3 responden / 90,00%)**, yang menyatakan **baik (1 responden / 10,00%)**, menyatakan **cukup baik (0 responden / 0%)**, dan yang menyatakan **kurang baik (0 responden / 0%)**. Dalam memeriksa perkara, Hakim terikat dengan sejumlah ketentuan Hukum Acara dan prosedur yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan sebuah perkara dapat berlangsung berbulan-bulan karena banyak sekali tahapan/prosedur yang harus dilalui dan tidak boleh dilangkahi. Untunglah saat ini telah ada Peraturan yang pada hakekatnya mempersingkat waktu pemeriksaan perkara tertentu, sehingga para pencari keadilan tidak perlu berlama-lama menunggu hasilnya.

4. Profesional Hakim

Hasil analisis pada ruang lingkup **Profesional Hakim** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:

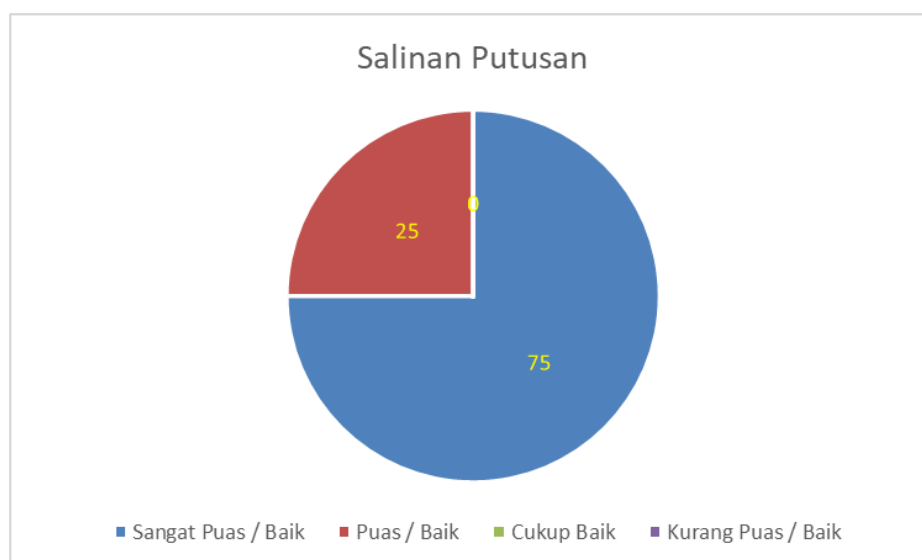


Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan Pengembalian Sisa Panjar Biaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang **Sangat Baik (2 responden / 50,00%)**, menyatakan **baik (2 responden / 50,00%)**, yang menyatakan **cukup baik (0 responden / 0%)**, dan tidak ada responden yang menyatakan **kurang baik**.

5. Pemberian Salinan Putusan

Hasil analisis pada ruang lingkup **Pemberian Salinan Putusan** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:

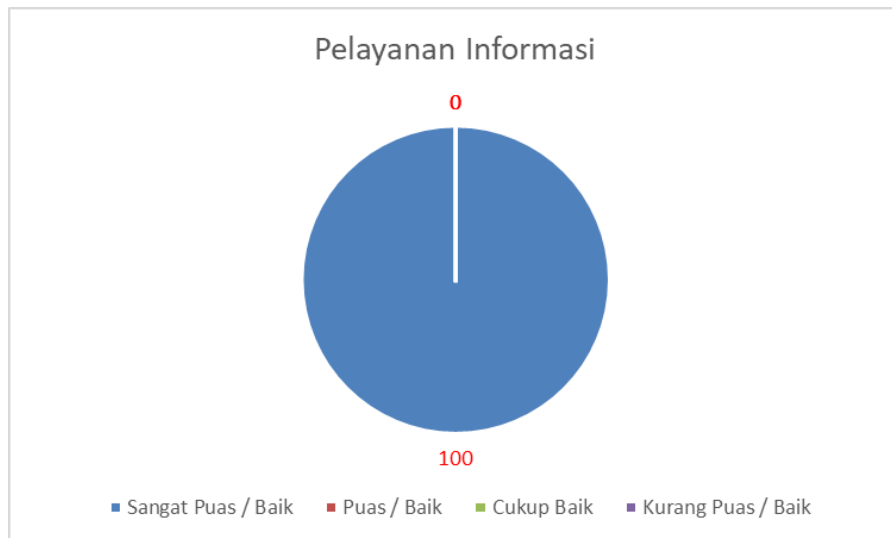


Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa semua responden menyatakan Pemberian Salinan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang **Sangat Baik (3 responden / 75,00%)**, menyatakan **baik (1 responden / 25,00%)**, yang menyatakan **cukup baik (0 responden / 0%)**, dan tidak ada responden yang menyatakan **kurang baik**.

6. Pelayanan Informasi

Hasil analisis pada ruang lingkup **Pelayanan Informasi** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:

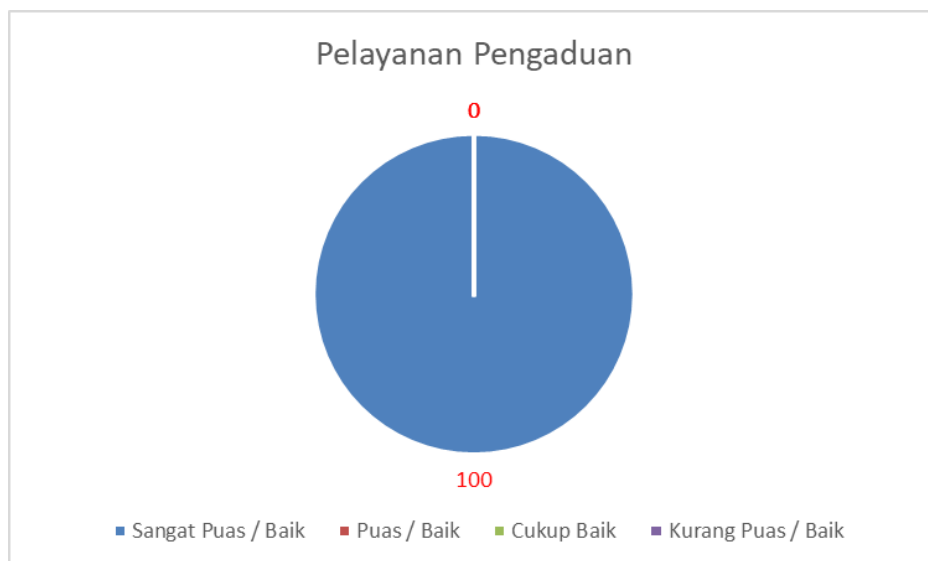


Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa semua responden menyatakan Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang **Sangat Baik (4 responden / 100,00%)**, menyatakan **baik (0 responden / 0%)**, yang menyatakan **cukup baik (0 responden / 0%)**, dan **kurang baik (0 responden / 0%)**.

7. Pelayanan Pengaduan

Hasil analisis pada ruang lingkup **Pelayanan Pengaduan** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:

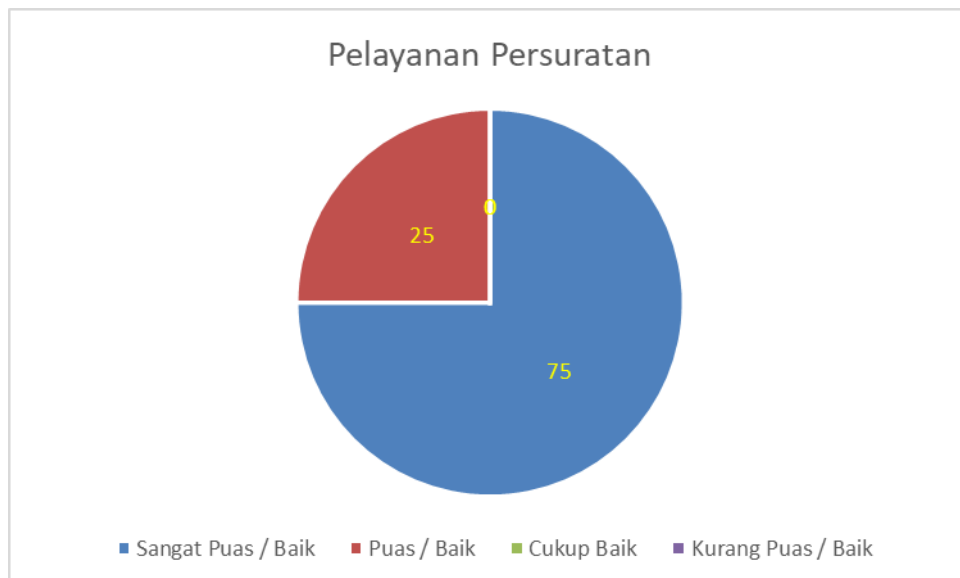


Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Diagram di atas menunjukkan bahwa semua responden menyatakan Kemampuan Petugas Pelayanan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang **Sangat Baik (4 responden / 100,00%)**, menyatakan **baik (0 responden / 0%)**, yang menyatakan **cukup baik (0 responden / 0%)**, dan **kurang baik (0 responden / 0%)**.

8. Pelayanan Persuratan

Hasil analisis pada ruang lingkup **Pelayanan Persuratan** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:



Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan pelayanan persuratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang **Sangat Baik (3 responden / 75,00%)**, menyatakan **baik (1 responden / 25,00 %)**, yang menyatakan **cukup baik (0 responden / 0 %)**, dan tidak ada responden yang menyatakan **kurang baik**.

9. Pengembalian Sisa Panjar Biaya

Hasil analisis pada ruang lingkup **Pengembalian Sisa Panjar Biaya** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini :

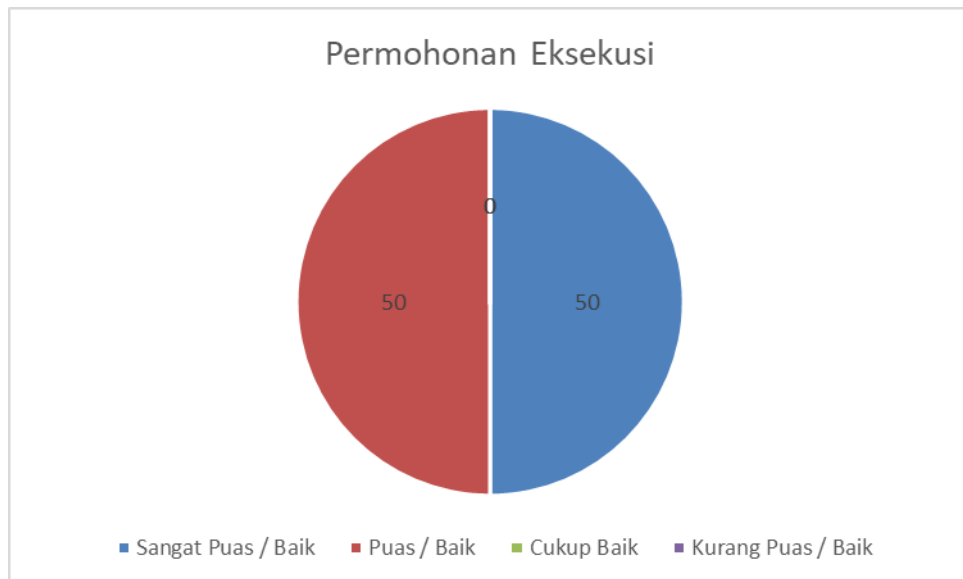


Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan Pengembalian Sisa Panjar Biaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang **Sangat Baik (0 responden / 00,00%)**, menyatakan **baik (4 responden / 100,00%)**, yang menyatakan **cukup baik (0 responden / 0 %)**, dan tidak ada responden yang menyatakan **kurang baik**. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah diputus dan diminutasi, jika masih ada sisa panjar biaya, maka pihak berperkara segera dihubungi untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut.

10. Permohonan Eksekusi

Hasil analisis pada ruang lingkup **Permohonan Eksekusi** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:

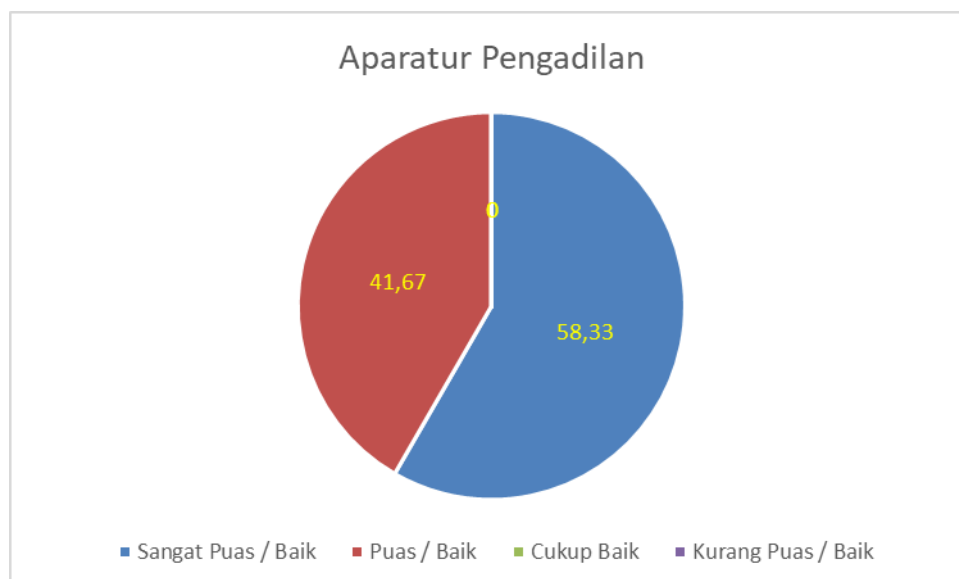


Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Penanganan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang **Sangat Baik (2 responden / 50,00%)**, menyatakan **baik (2 responden / 50,00%)**, yang menyatakan **cukup baik (0 responden / 0 %)**, dan tidak ada responden yang menyatakan **kurang baik**.

11. Aparatur Pengadilan

Hasil analisis pada ruang lingkup **Aparatur Pengadilan** secara ringkas disajikan dalam diagram berikut ini:



Survey Kepuasan Pelanggan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2021

Dari diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Aparatur Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang kinerjanya **Sangat Baik (2 responden / 41,67%)**, menyatakan **baik (2 responden / 58,33%)**, yang menyatakan **cukup baik (0 responden / 0 %)**, dan tidak ada responden yang menyatakan **kurang baik**, hal ini merupakan kerja keras seluruh komponen dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Suatu hal yang membanggakan bila tidak ada satupun responden yang menjawab kurang baik (0 responden/ 0%). Ini merupakan hal yang menggembirakan karena Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dianggap sangat mampu dalam bidang kompetensi. Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mampu menjalankan tugas walaupun dengan jumlah yang terbatas (7 orang Hakim, 17 orang Pegawai, 6 orang Tenaga Kontrak) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dibuat kebijakan untuk regenerasi/pengkaderan tiap bidang sehingga adanya rolling/mutasi diharapkan tidak mengganggu kinerja pelayanan. Terlebih Petugas Desk Info yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat, senantiasa dipantau dan diarahkan dalam menjalankan tugas pelayanan bagi masyarakat. Namun hal itu tidak akan berarti manakala pegawai bagian pelayanan tidak memiliki etos kerja yang baik, tidak disiplin dan tidak berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam pengisian kuesioner, sebagaimana dikemukakan dalam Bab IV, dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai rata-rata per unsur, nilai rata-rata tertimbang per unsur dan pada akhirnya dapat diperoleh nilai IKM nya serta kualitas kinerja.

Hasil perhitungan selengkapnya tercantum dalam table berikut:

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-Rata Unsur	Kategori	Kinerja
1	Fasilitas Pengadilan	96,88	A	Sangat Baik
2	Pendaftaran	95,83	A	Sangat Baik
3	Persidangan	97,50	A	Sangat Baik
4	Profesional Hakim	87,50	A	Sangat Baik
5	Pemberian Salinan Putusan	93,75	A	Sangat Baik
6	Pelayanan Informasi	100	A	Sangat Baik
7	Pelayanan Pengaduan	93,75	A	Sangat Baik
8	Pelayanan Persuratan	93,75	A	Sangat Baik
9	Pengembalian Sisa Panjar Biaya	75,00	A	Sangat Baik
10	Permohonan Eksekusi	87,50	A	Sangat Baik
11	Aparatur Pengadilan	89,58	A	Sangat Baik
Jumlah (nilai tertimbang)		91,91	A	Sangat Baik
IKM		3,68	A	Sangat Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa skor hasil Survei Kepuasan Pelanggan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah 91,91% dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah **3,68** dan termasuk dalam kategori **A** dengan kinerja **Sangat Baik**.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara keseluruhan adalah **3,68** artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian berada pada **kategori A** dengan mutu kinerja **SANGAT BAIK**;
2. Semua unsur penilaian diapresiasi secara baik oleh masyarakat, namun demikian masih terdapat unsur penilaian yang dianggap perlu untuk terus ditingkatkan yaitu pada unsur Pengembalian Sisa Panjar Biaya.

B. Rekomendasi

1. Semua unsur atau unit pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu ditingkatkan kinerjanya, agar unsur yang telah baik terus ditingkatkan, sementara unsur yang bernilai sangat baik agar dipertahankan dalam survei mendatang menjadi lebih baik.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang saat ini melaksanakan program untuk mengatasi Unsur Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, dengan cara menerapkan *Cash Management System* (CMS) bekerjasama dengan Bank BRI, sehingga apabila ada sisa panjar biaya perkara dapat langsung di transfer ke rekening pihak yang terdaftar. Cara ini mempermudah pekerjaan sehingga tidak butuh waktu lama dengan menunggu pihak datang untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut.
3. Hasil survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dapat dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua elemen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, mulai dari unsur pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga kontrak dan pada akhirnya juga bermanfaat dalam Pengambilan keputusan maupun penentuan arah kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
4. Survei kepuasan masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik minimal satu tahun sekali dengan jumlah responden yang semakin banyak, agar lebih representative mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur perkembangan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.